



Analisis Dinasti Politik Jokowi: Resiko Terulangnya Era Orde Baru

Fitri Nurhidayatul Ulla¹, Tedi Erviantono², Piers Andreas Noak³

Universitas Udayana

fitrinurhidayatululla22@gmail.com, erviantono2@unud.ac.id, piersandreasnoak@unud.ac.id

Abstract (English)

Political dynasty is one of the political phenomena, where in obtaining or maintaining power there is a blood relationship between the old power holder and the new power holder. Political dynasties in Indonesia have existed since the New Order. Political dynasties are rampant among state officials, political elites to regional officials. This research uses qualitative methods by applying literature study data collection techniques. This research analyzes Jokowi's political dynasty which risks a repeat of the new order era using Antonio Gramsci's hegemony theory. Political dynasties can result in easier practices of corruption, collusion and nepotism (KKN). Dynasties do not only occur with Jokowi but many state officials who perpetrate political dynasties. This increases the risk of a repeat of the authoritarian era of the New Order.

Article History

Submitted: 28 September 2024

Accepted: 7 October 2024

Published: 8 October 2024

Key Words

Political Dynasty, Hegemony, New Order

Abstrak (Indonesia)

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena politik, dimana dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adanya hubungan darah antara pemegang kekuasaan lama dan pemegang kekuasaan baru. Dinasti Politik di Indonesia sudah ada sejak orde baru. Dinasti Politik merajalela dari kalangan pejabat negara, elite politik hingga pejabat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data studi pustaka. Penelitian ini menganalisis dinasti politik Jokowi yang beresiko terulangnya era orde baru dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Dinasti politik dapat berakibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih mudah terjadi. Dinasti tidak hanya terjadi pada Jokowi akan tetapi banyak pejabat negara yang melanggengakan dinasti politik. Hal ini meningkatkan resiko terulangnya era otoriter orde baru.

Sejarah Artikel

Submitted: 28 September 2024

Accepted: 7 October 2024

Published: 8 October 2024

Kata Kunci

Dinasti Politik, Hegemoni, Orde Baru

1. PENDAHULUAN

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena politik, dimana dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan adanya hubungan darah antara pemegang kekuasaan lama dan pemegang kekuasaan baru. Dinasti Politik di Indonesia sudah ada sejak orde baru. Pada masa orde baru atau kepemimpinan Soeharto terdapat dinasti politik keluarga cendana. Meskipun sudah reformasi akan tetapi dinasti politik masih tumbuh subur di Indonesia. Dinasti Politik merajalela dari kalangan pejabat negara, elite politik hingga pejabat daerah.

Diketahui bahwa pejabat negara yang terlibat dinasti politik salah satunya Presiden Joko Widodo. Anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka sebelumnya pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan saat ini terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya Gibran Rakabuming Raka akan tetapi Kaesang Pangarep juga memiliki posisi strategis yakni Ketua Umum PSI. Kemudian menantu Presiden Joko Widodo yakni Bobby Nasution menjabat sebagai Walikota Medan, Adik ipar Presiden Joko Widodo Anwar Usman merupakan Mantan Ketua MK yang dipecat karena melakukan pelanggaran berat, Sepupu Presiden Joko Widodo yakni Sigit Widyawan merupakan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Keponakan Presiden Joko Widodo yakni Bagaskara Ikhlasulla Arif merupakan Manager *non-government relations* di PT Pertamina (Persero, dan Keponakan Presiden Joko Widodo yakni Joko Priyambodo merupakan Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik (anak perusahaan pertamina). Selain Presiden Joko Widodo juga terdapat elite politik yang juga termasuk dalam dinasti





politik seperti Putri Zulkifli Hasan yang terpilih menjadi Anggota DPR-RI tahun 2024-2029. Putri Zulkifli Hasan merupakan anak dari Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI, Ketua MPR RI, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia menggantikan Muhammad Lutfi. Sedangkan pejabat daerah yang termasuk dalam dinasti politik yakni Ratu Atut di Banten, Syukani Hasan Rais Bupati Kutai Kertanegara, Itoc Tochija Walikota Cimahi, Fuad Amin Imron Bupati Bangkalan, Amirrudin Inoed Bupati Banyuwangi, dan Hevearita Gunaryanti Rahayu alian Mbak Ita Walikota Semarang.

Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga tidak membatasi siapapun untuk ikut andil dalam kontestasi politik. Tetapi dinasti politik memiliki dampak yang buruk terhadap demokrasi di Indonesia dan merugikan pemerintahan seperti munculnya pejabat negara atau daerah dari dinasti politik yang tidak kompeten. Selain itu dinasti politik juga berpotensi besar meningkatkan korupsi di Indonesia, berpotensi terulangnya era otoritarian dan resiko bangkitnya kembali orde baru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Menurut Gramsci teori hegemoni berfokus pada cara kelompok-kelompok berkuasa mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Hegemoni bukan hanya tentang dominasi fisik, tetapi juga tentang membangun suatu sistem nilai dan ideologi yang mendukung kepentingan kelompok berkuasa. Hal ini memungkinkan kelompok berkuasa dapat mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang melalui pengaruh budaya dan ideologi.

Teori hegemoni Gramsci dapat digunakan untuk menganalisis kelompok-kelompok berkuasa dalam mempertahankan kekuasaan. Dimana Gramsci memasukkan praktik-praktik kelas kapitalis untuk mengambil kekuasaan atas negara. Setelah memperoleh kekuasaan kelompok berkuasa kemudian mempertahankan dan memelihara kekuasaan tersebut.

Teori hegemoni dapat dirumuskan menjadi empat bagian. Pertama teori ini menjelaskan tentang kemenangan yang di dapatkan dari berbagai kekuatan sosial dan politik. Kedua, kelompok yang berkuasa mempertahankan dominasi dan kekuasaannya. Dimana kelompok yang berkuasa mengembangkan usaha untuk merevisi konsensus dan ketertundukan kelas proletar, terutama melalui mekanisme kelembagaan dan pendidikan. Ketiga, kesadaran massa yang sudah terhegemoni dapat terbentuk dan siap melakukan aksi akibat terjadinya krisis hegemoni di kelas penguasa. Hal ini diyakini dapat menghasilkan perubahan revolusioner. Keempat, jika kaum proletar sadar terhadap kondisi yang ada dan mampu mengorganisir diri untuk menentukan langkah selanjutnya. Teori Gramsci juga dapat diterapkan untuk menganalisa fenomena dinasti politik yang terjadi di berbagai negara salah satunya Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan teknik pengumpulan data studi pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita. Dimana data di kumpulkan dari sumber-sumber yang relevan. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis data pada sumber jurnal ilmiah, buku, dan analisis berita. Penelitian ini menganalisis dinasti politik Jokowi yang beresiko terulangnya era orde baru dengan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinasti politik terjadi di berbagai negara salah satunya Indonesia, fenomena ini terjadi ketika pemegang kekuasaan masih terikat hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya



atau selanjutnya. Teori hegemoni Antonio Gramsci dapat membantu menganalisis bagaimana dinasti politik dapat bertahan dan berkembang.

a. Hegemoni Ideologis

Dinasti politik sering kali mengandalkan hegemoni ideologis untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka menciptakan narasi yang membenarkan keberadaan dinasti politik dan menganggap bahwa dinasti politik merupakan pilihan terbaik untuk memimpin. Narasi bisa diciptakan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Konten yang diposting oleh influencer atau kandidat yang bersangkutan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Seperti media sosial TikTok dan Instagram yang digunakan untuk mempengaruhi partisipasi politik generasi Z. Hal ini terjadi ketika Pemilihan Presiden tahun 2024, dimana Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo sekaligus Wakil Presiden terpilih memanfaatkan platform media sosial terutama TikTok untuk menjangkau pemilih muda atau generasi Z. Kampanye video kreatif dan menarik di TikTok membantu Gibran membangun citra positif dan menarik perhatian generasi muda.¹ Pemberitaan di media yang menyoroti kepemimpinan Gibran sebagai figur yang kuat dan tegas. Hal ini dapat menimbulkan narasi dimasyarakat pilihan terbaik adalah pasangan calon Prabowo dan Gibran tanpa mempertimbangkan bahwa jika memilih Gibran berarti melanggengkan Dinasti Politik.

Dinasti politik menggambarkan mereka sebagai pelindung kepentingan rakyat, meskipun faktanya mereka lebih mementingkan kepentingan keluarga atau kelompok mereka. Hal ini dapat dilihat ketika keterlibatan Gibran dalam politik disebut sebagai bentuk kesinambungan dari kebijakan pro-rakyat yang telah dijalankan oleh Jokowi. Para pendukung Gibran mengatakan bahwa Gibran memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat, berkat pengalaman langsung dari Joko Widodo yang sering terjun secara langsung ke masyarakat.

Presiden Joko Widodo sering menyatakan bahwa kebijakan dibawah kepemimpinannya dirancang untuk memberikan manfaat bagi rakyat kecil. Selain itu juga mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol telah meningkatkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Dengan mengulangi narasi bahwa kekuasaan harus tetap dalam satu keluarga atau kelompok. Dinasti politik menciptakan konsensus di masyarakat, bahwa dinasti politik merupakan hal yang wajar dan bisa diterima.

Dinasti politik sering memanfaatkan berbagai institusi sosial atau negara untuk memperkuat posisi mereka dalam memegang kekuasaan. Dinasti politik juga dapat mengendalikan media untuk membentuk opini publik sehingga masyarakat mendukung keberadaan mereka. Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi membuat keputusan batas usia capres-cawapres. Keputusan ini menjadi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Kebijakan MK dianggap sebagai upaya Jokowi untuk memanfaatkan institusi negara dalam memperkuat kekuasaannya.

Selanjutnya Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI sebuah posisi strategis dalam partai. Penunjukkan ini memperlihatkan bahwa Jokowi berusaha membangun basis kekuasaan yang solid melalui keluarganya.

Adanya terminologi “Jokowisme” yang digunakan oleh PSI untuk menggambarkan visi misi Jokowi. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan Jokowi sebagai pemimpin yang bekerja keras memajukan rakyat dan memiliki paham progresivitas pembangunan negara

¹ Hermawan, Abdul Latief Najmuddin. 2024. “Pengaruh Kampanye Prabowo Gibran di TikTok terhadap Pilihan Politik”. Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kampanye-Prabowo-Gibran-di-Tiktok-terhadap-Hermawan-Najmuddin/42871360d5b4903eb66de399e5480715d600eb69>





yang berkeadilan dan berdaulat. Strategi komunikasi ini membantu membangun image baik Jokowi dan keluarganya di mata masyarakat.

b. **Konsensus dan Paksaan**

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dirancang untuk mengincar suara anak muda serta mengkampanyekan antikorupsi dan intoleransi. Saat ini Ketua Umum PSI adalah Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Jokowi. Selain Kaesang, Gibran Rakabuming Raka saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden. Hal ini menimbulkan kritik keras tentang nepotisme dan pembentukan trah politis. Manipulasi hukum terjadi ketika MK memutuskan untuk menurunkan batas usia capres-cawapres. Keputusan ini disebut sebagai langkah strategis Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya. Kejadian ini membuat banyak kritikus mengecam praktik nepotisme yang dilakukan Jokowi. Mereka berpendapat bahwa penunjukkan anggota keluarga ke posisi strategis hanya demi mempertahankan kekuasaan, sehingga hal ini melanggar etika demokrasi dan hampir mirip dengan rezim orde baru.

c. **War of Position**

War of position merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merujuk pada tahap awal dalam perjuangan kelas di mana kelompok dominan berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaannya melalui konsolidasi kultural dan ideologis. Dimana Jokowi dan timnya berhasil membangun narasi positif tentang kepemimpinannya dan keluarganya. Jokowi menciptakan konsensus di kalangan masyarakat bahwa dinastinya merupakan representasi dari aspirasi rakyat. Dinasti politik dapat dilihat sebagai manifestasi dari elite politik yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka melalui hubungan keluarga dan jaringan sosial. Di Indonesia dinasti politik sering melibatkan anggota keluarga dalam jabatan publik. Hal ini dapat menunjukkan adanya pengulangan kekuasaan di antara elite politik.

Dinasti politik sering terjadi akibat pemegang kekuasaan melibatkan beberapa anggota keluarga dalam posisi kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi calon pemimpin yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan dan dapat menciptakan konsolidasi kekuasaan yang mirip dengan struktur pemerintahan Orde Baru. Dimana ketika dinasti politik menguasai pemerintahan, maka sering terjadi kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dinasti politik sering memanfaatkan isu-isu identitas untuk memperkuat basis dukungan.

Selain itu dinasti politik memiliki resiko terulangnya kembali era orde serta mencerminkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998. Dinasti politik dapat mengancam hak-hak konstitusional rakyat dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Normalisasi kekuasaan dinasti politik dianggap merusak demokrasi dalam sistem pemilihan. Kondisi ini menunjukkan keburukan jalur penjurangan pemimpin di Indonesia, yang tidak transparan dan terbatas untuk orang-orang tertentu. Akibatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih mudah terjadi.

5. KESIMPULAN

Dinasti politik sering memanfaatkan institusi sosial dan negara untuk memperkuat posisinya dengan strategi-strategi yang kompleks termasuk anggota keluarga mendapatkan posisi strategis di partai politik, manipulasi hukum, strategi komunikasi, dan netralitas dalam kontestasi politik bertujuan untuk dinasti politik tetap kuat dan dapat tetap memegang kekuasaan. Normalisasi kekuasaan dinasti politik dianggap merusak demokrasi dan fairness dalam sistem pemilihan. Praktik ini meningkatkan pragmatisme politik dan menghalangi partisipasi masyarakat karena status sosial atau hak mereka jauh berbeda dengan keluarga dinasti. Selain itu dinasti politik dapat berakibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lebih mudah terjadi. Dinasti tidak hanya terjadi pada Jokowi akan tetapi banyak pejabat



negara yang melanggengakan dinasti politik. Hal ini meningkatkan resiko terulangnya era otoriter orde baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahma, Alvina Alya, dkk. 2022. “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia”. Diakses tanggal 18 Agustus 2024 pada <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034731&val=20674&title=PengaruhDinastiPolitikTerhadapPerkembanganDemokrasiPancasilaDiIndonesia>
- Hutagalung, Daniel. 2004. “Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi”. Diakses tanggal 30 September 2024 pada https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi
- Siswati, Endah. 2018. “Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci”. Diakses tanggal 30 September 2024 pada https://www.researchgate.net/publication/333445333_ANATOMI_TEORI_HEGEMONI_ANTONIO_GRAMSCI
- Lestari, Lilis, Nensialianta. 2019. “Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk Karya Tere Liye (Pendekatan Teori Hegemoni Antonio Gramsci)”. Diakses tanggal 30 September 2024 pada <https://core.ac.uk/outputs/196552352/>
- Aisy, Salsabillah Rahadatul. 2023. “Dinasti Politik di Indonesia Studi Kasus Kekuasaan di Berbagai Periode Sejarah.” Diakses tanggal 18 Agustus 2024 pada https://www.researchgate.net/publication/375989821_Dinasti_Politik_di_Indonesia_Studi_Kasus_Kekuasaan_Keluarga_di_Berbagai_Periode_Sejarah
- Ali, Zezen Zaenudin. 2017. “Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1837) di Italia.” Diakses tanggal 30 September 2024 pada https://www.researchgate.net/publication/368089270_PEMIKIRAN_HEGEMONI_ANTONIO_GRAMSCI_1891-1937_DI_ITALIA
- Liputan6. 2024. “KPK Tetapkan Walikota Semarang Mbak Ita dan Suaminya sebagai Tersangka Korupsi.” Diakses tanggal 18 Agustus 2024 pada <https://www.liputan6.com/news/read/5658908/kpk-tetapkan-wali-kota-semarang-mbak-ita-dan-suaminya-sebagai-tersangka-korupsi>
- Hermawan, Abdul Latief Najmuddin. 2024. “Pengaruh Kampanye Prabowo Gibran di TikTok terhadap Pilihan Politik”. Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kampanye-Prabowo-Gibran-di-Tiktok-terhadap-Hermawan-Najmuddin/42871360d5b4903eb66de399e5480715d600eb69>
- Fardiansyah, Hardi, Euis Komalawati. 2024. “Political Communication Strategy and Public Opinion for the Victory of the Prabowo Gibran Pair in the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections of the Republic of Indonesia”. Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://www.semanticscholar.org/paper/Political-Communication-Strategy-and-Public-Opinion-Fardiansyah-Komalawati/22323dae0388a4207a9c04f7f5f8aa51f2deb76d>
- Antara. 2018. “Kebijakan Jokowi selalu berorientasi kepentingan rakyat kecil.” Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://m.antarane.ws.com/berita/757259/kebijakan-jokowi-selalu-berorientasi-kepentingan-rakyat-kecil>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2021. “Presiden Jokowi Ajak Seluruh Komponen Bangsa untuk Bela Negara.” Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada





<https://www.kemhan.go.id/2021/12/19/presiden-jokowi-ajak-seluruh-komponen-bangsa-untuk-bela-negara.html>

PBHI. 2024. “*Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya.*” Diakses tanggal 5 Oktober 2024 pada <https://pbhi.or.id/selamatkan-indonesia-dari-kepentingan-dan-ambisi-kekuasaan-jokowi-keluarga-serta-kroni-kroninya-kembalikan-indonesia-untuk-kepentingan-rakyat-seluruhnya/>

Syafaatin, Nina Zulfah, Eva Eri Dia. 2024. “*Representasi Hegemoni pada Pemberitaan Menjelang Pemilu 2024 pada Harian Kompas.com Edisi 13 November 2023.*” Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/13363/10267/24581>

Tempo. 2024. “*Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional.*” Diakses tanggal 05 Oktober 2024 pada <https://nasional.tempo.co/read/1845894/politik-dinasti-jokowi-ramai-ramai-disorot-pengamat-politik-pakar-hukum-tata-negara-sampai-media-internasional>